

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3939)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57)

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK No. 54/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

Putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu.

Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PHP.BUP-XIX/2021 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Rokan Hulu

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu
Raijua

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 104/PHP.BUP-XIX/2021 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Morowali Utara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHP.BUP-XIX/2021 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Halmahera Utara

C. Buku

Aini, Noryamin, 2019, *Pilkada Langsung: Demokrasi, Korupsi, dan Stabilitas Keamanan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimmly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 169.

Bachtiar, 2021, *Mendesaian Penelitian Hukum*, Penerbit deepublish, Sleman.

Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Haboddin, Muhtar, 2016, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Penerbit UB Press, Malang, hlm. 9

Lutfi, Mustafa, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm. 100.

Mahkamah Konstitusi dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 158.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Raco, J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Penerbit Grasindo, Jakarta.

Sarman, Mukhtar, 2015, *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, LKIS Printing Cemerlang, Yogyakarta.

Setiawan, Dian Bakti, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, *RajaGrafindo Persada*, Depok, hlm. 80.

Soekanto, Soerjono, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

D. Jurnal

Ayuni, Qurruto, “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, Maret 2018

Bisariyadi, “Ombang-Ambing Ambang Batas”, *Majalah Konstitusi*, No. 168, Februari 2021

Bisariyadi, “Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, Tahun 2019

Editorial. “Kandas di Tengah Jalan”, *Majalah Konstitusi*, No. 122, April 2017.

- Gaffar, Janedjri M dalam Jeremy L. C. Sanger, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, Desember 2018
- Hamda Kurniawan, “Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab”, *Jurnal Kajian Kepemiluan*, Agustus 2019, hlm. 15.
- Huda Miftahul, “Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 2, April 2010
- Idris, Tarwin “Penggunaan Pasal 158 Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Majalah Konstitusi*, Nomor 172, Juni 2021.
- Insiyah, Sayyidatul, et.al., “Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, hlm. 71
- International IDEA, “Electoral System Reform and Design”, *Charter Change Issues Brief No.2*, November 2019
- Nur Rosihin Ana, “DUA KALI PSU LABUHANBATU”, *Majalah Konstitusi*, Nomor 172, Juni 2021
- Nur Rosihin Ana, “Sengketa Hasil Pilkada (Belum) Berakhir”, *Majalah Konstitusi*, Nomor 169, Maret 2021
- Palguna, I Dewa Gede, Bisariyadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1, hlm. 5.

Pardede, Marulak, “Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah”, *Jurnal De Jure*, Vol. 18,

No. 2, Juni 2018, hlm. 128.

RS, Iza Rumestan “Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada”, *Jurnal Konstitusi*,

Vol. 11, No. 4, Desember 2014

Suhartono, Slamet “Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam

Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, *Jurnal Konstitusi*,

Vol. 12, No. 3, September 2015

Sutrisno, Cucu, “Partisipasi Warga dalam Pilkada”, *Jurnal Pancasila dan*

Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, Juli 2017

Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal

di Indonesia”, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2017

Lailam, Tanto, Putri Anggia, “Pengenyalangan Keadilan Substantif Dalam

Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah

Konstitusi”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 212.

Zoelva, Hamdan, “Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh

Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, September

2013

E. Makalah

Fahmi, Khairul, “MK & KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK”,
Makalah, Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi, Bogor, 16 Juni 2021

F. Internet Webinar, Wawancara, dan Diskusi Dalam Jaringan

Alfian, “Pilkada Serentak 9 Desember 2020”,
<https://kediri.bawaslu.go.id/pilkada-serentak-9-desember-2020/>,
diakses 31 Mei 2023.

Basyari, Iqbal, “Muncul Gugatan Sengketa Jilid II, Sinyal Masih Ada Persoalan
di Pemungutan Suara”,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/09/muncul-gugatan-sengketa-jilid-ii-sinyal-masih-ada-persoalan-di-pemungutan-suara-ulang>, diakses 30 Mei 2023.

Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-2208294/mendagri-50-tewas-akibat-kerusuhan-pemilu-kada>, diakses 30 Mei 2023

Dian Dewi Purnamasari, “Badai Covid-19 di MK Saat Gugatan Pilkada
Menumpuk”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/21/banjir-perselisihan-pilkada-dan-mitigasi-perkara-di-mk>, diakses 18 Juni 2023.

Dian Dewi Purnamasari, “Pilkada Belum Sepenuhnya Jawab Harapan Publik”,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/15/pilkada-belum-sepenuhnya-jawab-harapan-publik>, diakses 31 Mei 2023

Farisa, Fitria Chusna, “Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan
Tantangan”,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan->

pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan, diakses 19

Maret 2023.

Iqbal Basyari, “*Penyampingan Syarat Selisih Suara Kasuistik*”,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/02/16/penyampingan-syarat-selisih-suara-kasuistik>, diakses 11 Juni 2023.

Iqbal Basyari, “Pergeseran Pemeriksaan Ambang Batas Beri Harapan”,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/27/pergeseran-pemeriksaan-ambang-batas-beri-harapan>, diakses 7 Juni 2023.

Rizal Fadli, “Ketahui Perbedaan dari Swab Test Antigen dan PCR”,
<https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-dari-swab-test-antigen-dan-pcr>, diakses 18 Juni 2023.

Rozaq, Abdul “Kekosongan Kekuasaan Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024”,
<https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/>, diakses 19 Maret 2023.